PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)

Oleh:
TIKA YUNIARTI
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: yuniarti.tika@ymail.com

ABSTRACK

Tax revenue in Indonesia is still difficult to increase, it is because they still lack companies and private persons who are registered as taxpayers, the condition gets worse when registered taxpayers are also not actively pay taxes. In 2015, personal income tax revenue in KPP Pratama Bandung Tegallega decreased from the previous year. The purpose this study was to find out how big is the influence of the number of registered taxpayers and tax collection through the issuance of enforced against personal income tax revenue in the Tax Office Primary Bandung Tegallega.

The study was conducted by using descriptive and verification method with quantitative approach. The data obtained is secondary data consists of data of an individual taxpayer is registered, the data forced letter published data and personal income tax revenue during the years 2013-2015. Research carried out by the technical multiple regression analysis using software SPSS version 21.

The results showed that the number of taxpayers effect on personal income tax revenue, and tax billing forced letter effect on personal income tax revenue.

Keywords: Tax Payers, Tax Billing, Forced Letter, Personal Income Tax Revenue.

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung diantaranya tersedia dana guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal, sumber dana tersebut dapat diperoleh dari pajak (Rahayu, 2013). Hal senada dikatakan Zuraida dan Advianto (2011) yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan terbesar negara (Yoesoef, 2013).

Joko Widodo (2016) mengatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih sangat kecil, sehingga perlu untuk ditingkatkan. Selanjutnya, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro (2016) mengatakan bahwa Dirjen Pajak perlu memperbaiki penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi, karena saat ini masih tergolong minim. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi selama tahun 2013 hingga tahun 2015 di KPP Pratama Bandung Tegallega mengalami fluktuatif, penerimaan pajak tersebut masih banyak yang tidak mencapai target bulanannya, dan penerimaan pajak mengalami penurunan di tahun 2015. Menurut Dahnil Anzar (2015) penerimaan pajak di Indonesia yang sulit ditingkatkan disebabkan karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak, kondisi semakin parah saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar pajak, tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga datang dari wajib pajak individu.

Selama tahun 2013 hingga tahun 2015, jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega terus mengalami peningkatan, hal serupa terjadi pada jumlah tindakan aktif penagihan melalui surat paksa, jumlah surat paksa yang diterbitkan sebagai tindakan penagihan pajak mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan

bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi malah mengalami penurunan ketika jumlah wajib pajak dan surat paksa yang diterbitkan meningkat.

1.2. Identifikasi Masalah

1) Penerimaan dari wajib pajak orang pribadi masih tergolong minim.
2) Jumlah wajib pajak bertambah tapi penerimaan pajak malah menurun.
3) Kegiatan Penagihan dengan surat paksa bertambah namun penerimaan pajak justru menurun.

1.3. Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2) Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran dengan melihat seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4.2. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.5.2. Kegunaan Akademis

1) Bagi Peneliti
   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan dan gambaran langsung tentang pengaruh jumlah wajib pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.
2) Bagi Peneliti Lainnya
   Diharapan pelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam bidang yang sama, mengenai pengaruh jumlah wajib pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Jumlah Wajib Pajak

2.1.1.1. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut:

"Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak".

2.1.2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.1.2.1. Pengertian Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013) menyatakan:

"Penagihan pajak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai

pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas".
Sedangkan menurut Mardiasmo (2013) definisi surat paksa adalah sebagai berikut:
"Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

2.1.3. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.3.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012: 46) mengatakan bahwa:
"Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Abdul Jabbar Yosoef (2013) mengatakan bahwa:
"Secara filosofi, pertumbuhan wajib pajak akan mendatangkan *income* negara sebanding dengan pertumbuhannya. Dengan kata lain penerimaan pajak dari wajib pajak tersebut akan semakin besar untuk modal pembangunan Indonesia kedepan".

2.2.2. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011) mengatakan bahwa:
"Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak".

2.3. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis adalah sebagai berikut:
H_1 : Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
H_2 : Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka).

Objek dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak, penagihan pajak dengan surat paksa dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Unit observasi atau tempat penelitian di unit analisis yaitu pada bagian Penagihan dan bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

3.2. Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel Bebas / *Independent Variable* (*x*)
   Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak (X_1) dan penagihan pajak dengan surat paksa (X_2).
2) Variabel Terikat / *Dependent Variable* (*z*)
   Variabel terikat pada penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Yaitu jumlah realisasi besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya

data-data tersebut berupa data primer yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari KPP Pratama Bandung Tegallega.

3.4. Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah data selama 31 tahun dimulai dari tahun 1984, tahun revormasi perpajakan dimana sistem perpajakan dirubah dari *Oficial Assesment* menjadi *Self Assessment*, hingga tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3.4.2. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampling.* Definisi *Purposive Sampling* menurut Sugiyono (2013: 68) yaitu:

"Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu".

Pertimbangan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah data sampel tersedia lengkap, maka sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah data yang tersedia lengkap di KPP Pratama Bandung Tegallega, yaitu data selama 3 tahun dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2015, karena data untuk tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia secara lengkap dan sebagian besar sudah tidak diarsipkan di KPP Pratama Bandung Tegallega.

3.4.3. Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.3.1. Tempat Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega di Jl. Soekarno-Hatta No. 216.

3.4.3.2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016.

3.5. Metode Pengujian Data

Pengujian data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi) untuk memenuhi syarat *BLUE (Best Linear Unbias Estimation)*.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Berganda. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor di manipulasi. Analisis ini digunakan karena penelitian ini dirancang untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Desktiprif

4.1.1.1. Deskriptif Jumlah Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega selama tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Besar pertumbuhan jumlah wajib pajak dilihat dari nilai rata-rata jumlah wajib pajak per tahunnya dari tahun 2013 ke tahun 2014 bertambah sebanyak 8,1% dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 bertambah sebanyak 7,1%.

4.1.1.2. Deskriptif Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Jumlah tindakan penagihan pajak dengan melalui penerbitan surat paksa di KPP Pratama Bandung Tegallega selama tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Besarnya peningkatan penerbitan surat paksa yang dilihat dari nilai rata-rata per tahunnya dari tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat sebanyak 478,3% dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sebanyak 169,7%.

4.1.1.3. Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega tidak mencapai targetnya di beberapa bulan. Pada tahun 2013, penerimaan pajak tidak mencapai targetnya di delapan bulan. Kemudian bertambah satu, pada tahun 2014 penerimaan pajak tidak

mencapai targetnya di sebilan bulan. Sedangkan pada tahun 2015, sebanyak tiga bulan penerimaan pajak tidak mencapai targetnya. Berdasarkan nilai rata-rata penerimaan per tahunnya, perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami peningkatan sebanyak 86,1% dari tahun sebelumnya, sedangkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11,3% dari tahun sebelumnya.

4.1.2. Analisis Verifikatif

4.1.2.1. Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Alat pengujian yang digunakan yaitu tes *Kolmogorov Smirnov*. Distribusi residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi atau Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 atau tingkat kekeliruan sebesar 5%. Nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,391 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance lebih dari 0,1. nilai *tolerance* kedua variabel bebas sebesar 0,845 yang mana > 0,1 dan nilai VIF semua variabel sebesar 1,183 yang mana < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data.

3) Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Alat pengujian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dengan redsidualnya (ZPRED). Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila pada tabel *Scatterplot* tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

4) Uji Autokorelasi

Dengan melakukan uji Durbin Watson, dapat diketahui apakah terdapat autokorelasi antar sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Kriteria yang digunakan adalah:

- Jika 1 < DW < 3 , maka tidak terjadi autokorelasi
- DW < 1 dan DW > 3, maka terjadi autokorelasi

Dari hasil perhitungan diperoleh angka DW sebesar 1,359. Berpedoman pada kriteria yang telah disebutkan di atas, karena nilai DW sebesar 1,359 berada diantara 1 dan 3, maka dapat dipastikan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

4.1.2.2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dari perhitungan regresi yang telah diolah, diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = -43{,}0666 + 0{,}0005X_1 + 0{,}0226X_2$$

4.1.2.3. Korelasi Parsial

Hubungan antara Jumlah Wajib Pajak (X1) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 0,494 termasuk dalam hubungan yang sedang. Sedangkan hubungan antara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X2) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 0,632 termasuk dalam hubungan yang tinggi.

4.1.2.4. Koefisien Determinasi

Untuk melihat bersar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta x Zero Order*.

Jumlah Wajib Pajak (X1)	0,291	x	0,494	=	0,144	atau	14,4%
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X2)	0,517	x	0,632	=	0,327	atau	32,7%

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh terbesar berasal dari variabel Jumlah Wajib Pajak (X1) dengan kontribusi sebesar 14,4% sedangkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X2) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 32,7%.

4.1.2.5. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Tingkat signifikasnsi (α) sebesar 5%, dk= (n-k-1) 36-2-1 = 33, dengan pengujian 2 pihak sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2,035. Jumlah Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) karena nilai t-hitung (2,110) berada pada daerah penolakan H_0, dengan kata lain H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X2) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) karena nilai t-hitung (3,754) berada pada daerah penolakan H_0, dengan kata lain H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Nilai korelasi antara jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 0.494 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Besar pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 14,4%, artinya sebesar 14,4% penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh jumlah wajib pajaknya, sedangkan sisanya sebesar 85.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah t_{hitung} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,110 > 2,035), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Nilai signifikasi untuk variabel jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah 0,043 artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar 4,3%, lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu sebesar 5%. Kesimpulannya, jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kesimpulan di atas telah menjawab fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dimana pada tahun 2015 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan dari tahun 2014 disaat jumlah wajib pajak pada saat itu mengalami peningkatan. Seharusnya menurut teori para ahli ketika jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak, fenomena tersebut menggambarkan hubungan negatif, hasil penelitian menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Indry Anggina Hasibuan, Yunilma dan Popi Fauziati (2014) yang menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dan didukung teori yang dijelaskan oleh Abdul Jabbar Yoesoef (2013) yang mengatakan bahwa secara filosofi, pertumbuhan wajib pajak akan mendatangkan *income* negara sebanding dengan pertumbuhannya, dengan kata lain penerimaan pajak dari wajib pajak tersebut akan semakin besar untuk modal pembangunan Indonesia kedepan.

4.2.2. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Nilai korelasi antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 0.632 yang tergolong dalam kategori tinggi. Hubungan bersifat positif artinya setiap kenaikan penagihan pajak dengan surat paksa maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Besar pengaruh penagihan pajak

dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 32,7%, artinya sebesar 32,7% penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat paksa, sedangkan sisanya sebesar 67,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah t_{hitung} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,754 > 2,035), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Nilai signifikasi untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah 0,001 artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar 0,1%, lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu sebesar 5%. Kesimpulannya, penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kesimpulan di atas telah menjawab fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dimana pada tahun 2015 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan dari tahun 2014 disaat penagihan pajak dengan surat paksa pada saat itu mengalami peningkatan. Seharusnya menurut teori yang dikemukakan oleh para ahli ketika tindakan penagihan pajak meningkat maka penerimaan pajak pun akan meningkat, fenomena tersebut menggambarkan hubungan negatif, hasil penelitian menyebutkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Derlina Sutria Tunas (2013) yang menyebutkan bahwa tunggakan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dan didukung oleh teori oleh Chairil Anwar Pohan (2014) yang mengatakan bahwa salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak negara adalah hasil penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh jumlah wajib pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Saran Praktis
   Saran bagi KPP, agar menambah jumlah wajib pajak orang pribadi dengan melakukan tindakan eksentifikasi untuk para subjek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan juga menegakkan hukum pajak dengan menindaklanjuti para wajib pajak yang telah terdaftar namun belum membayar pajaknya dengan benar, maka dapat dilakukan penagihan pajak baik dengan surat teguran, surat paksa, dan tindakan aktif lainnya.
2) Saran Akademis
   Saran bagi penelitian selanjutnya, penelitian bebas yang digunakan hendaknya tidak hanya jumlah wajib pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa, karena masih banyak faktor internal maupun eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, selain itu jumlah sampel yang digunakan bisa diperbanyak lagi untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Anzar, Dahnil. 2015. *Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Mengenaskan.* (http://www.merdeka.com) [Diakses 27 April 2016]

Brodjonegoro, Bambang Permadi Soemantri. 2016. *Menkeu Tantang Ken Dwijugeasteadi Tingkatkan Pajak Pribadi.* (http://ekbis.sindonews.com/) [Diakses 3 Maret 2016]

Hasibuan, Indry Anggina, Yunilma dan Popi Fauziati. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Padang.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta Vol.4 No 1 2014.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi.* Yogyakarta: Andi.

Nasution, Rahmad Husein, Herawati, Dandes Rifa. 2014. *Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang.* Vol 4, No 1 (2014)

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: AlfaBeta.

Tunas, Derlina Sutria. 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 1520-1531.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Widodo, Joko. 2016. *Jokowi Ingin Tiap Tahun Ada Rekor Penerimaan Pajak*. (http://bisnis.liputan6.com/) [Diakses 3 Maret 2016]

Yoesoef, Abdul Jabbar. 2013. *Kunci Surveyor Membidik Perkembangan Industri Domestik Meningkatkan Penerimaan Pajak & Royalti.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo KOMPAS Gramedia

Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel (Definisi Variabel)	Indikator	Skala
Jumlah Wajib Pajak (X_1)	Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indoneia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). (Siti Kurnia Rahayu, 2013)	"Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP" Jumlah NPWP yang terdaftar (Waluyo. 2011)	Rasio
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X_2)	Menurut Rochmat Soemitro, penagihan pajak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas. (Siti Kurnia Rahayu, 2013)	"Surat paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar" Surat Paksa yang diterbitkan (Siti Resmi. 2014)	
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)	Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Rosdiana & Irianto, 2012)	"Penerimaan pajak penghasilan pribadi dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam jutaan rupiah" Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Husein dkk. 2014)	

Tabel 4.4
Uji Normalitas Model Regresi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	7,10418361
Most Extreme Differences	Absolute	,150
	Positive	,150
	Negative	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		,901
Asymp. Sig. (2-tailed)		,391

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Jumlah WPOP (X1)	,845	1,183
	Jumlah Surat Paksa (X2)	,845	1,183

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPh OP (Y)

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.686[a]	.470	.438	7.31630	1.359

a. Predictors: (Constant), Jumlah Surat Paksa (X2), Jumlah WPOP (X1)

b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPh OP (Y)

Tabel 4.7
Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-43,0666	20,7017		-2,080	,045
	Jumlah WPOP (X1)	,0005	,0002	,291	2,110	,043
	Jumlah Surat Paksa (X2)	,0226	,0060	,517	3,754	,001

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPh OP (Y)

Tabel 4.9
Koefisien Korelasi Parsial

Correlations

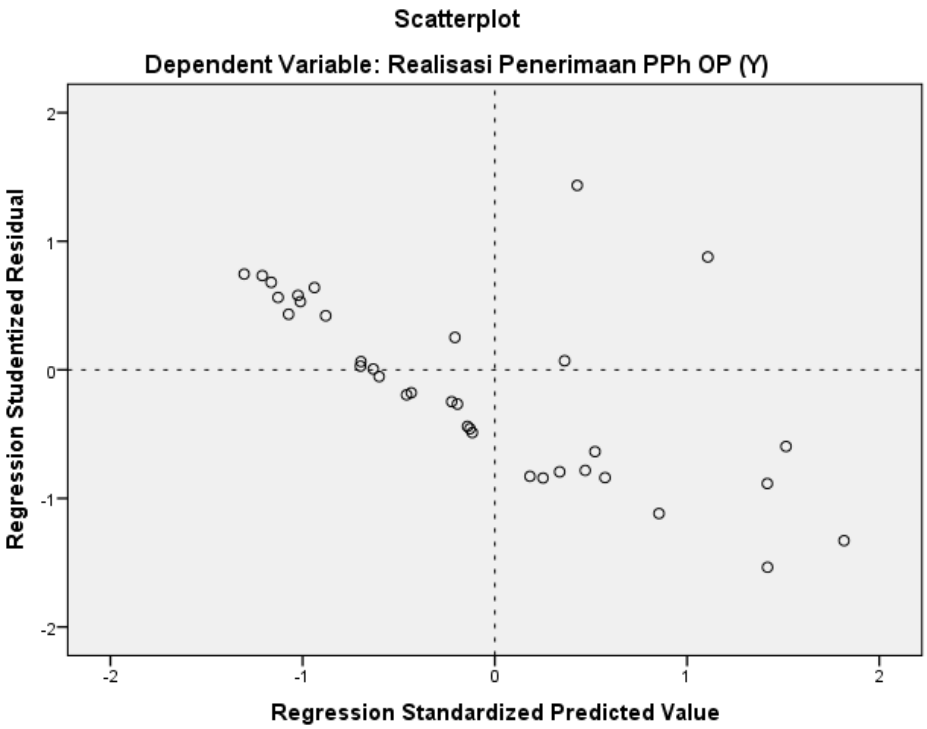
		Realisasi Penerimaan PPh OP (Y)
Jumlah WPOP (X1)	Pearson Correlation	,494
	Sig. (2-tailed)	,002
	N	36
Jumlah Surat Paksa (X2)	Pearson Correlation	,632
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	36

Tabel 4.11
Pengaruh Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Jumlah WPOP (X1)	,291	,494
	Jumlah Surat Paksa (X2)	,517	,632

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPh OP (Y)



Gambar 4.4
Uji Heteroskedastisitas